



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 788/IX/2013

III/SEPTEMBER 2013



DPR Sampaikan Petisi Wilfrida ke Malaysia



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA SEPTEMBER 2013

Minggu ketiga bulan September, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna 17 September 2013 yang mengagendakan Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil pembahasan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, sekaligus pengambilan keputusan dan pembentukan panitia-panitia khusus. Kegiatan diplomasi Parlemen antara lain pengiriman delegasi Sidang Umum AIPA ke-34 di Brunei Darussalam.

Rapat Paripurna 17 September

Pelaksanaan Rapat Paripurna tanggal 17 September ini diagendakan oleh Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Fraksi-Fraksi DPR-RI (Sebagai pengganti Rapat Bamus), yang diselenggarakan pada 16 September. Pada rapat ini ditetapkan bahwa Rapat Paripurna 17 September diagendakan dua acara yaitu: [1] Laporan Pimpinan Komisi XI DPR-RI mengenai hasil pembahasan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dan pengambilan keputusan; [2] pengesahan pembentukan dua Pansus, yaitu Pansus RUU Panas Bumi dan Pansus RUU tentang Advokat.

Pada agenda pertama, Pimpinan Komisi XI melaporkan bahwa pembahasan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dilaksanakan berdasar ketentuan Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3), serta Pasal 50 ayat (1) UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2009. Berdasarkan usulan Presiden yang mengajukan dua nama, yaitu Mirza Adityaswara dan Anton Hermanto Gunawan untuk mengisi kekosongan jabatan Deputy Gubernur Senior BI, Komisi XI telah melakukan kegiatan-kegiatan yaitu: [1] tanggal 2 September 2013 dilakukan RDP dan RDPU dengan PPAK dan pakar/pengamat ekonomi untuk mendapat masukan; [2] tanggal 3 September dilakukan RDPU dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan terhadap kedua calon; dan [3] tanggal 16 September 2013 melakukan Rapat Komisi untuk melakukan proses pengambilan keputusan.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



Pada tanggal 16 September inilah dilakukan pengambilan keputusan yang didasarkan dari pemungutan suara yang diikuti 48 anggota Komisi XI yang hadir. Komisi XI menyepakati untuk memilih Mirza Adityaswara (32 suara) sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Dalam pemungutan suara, Anton Hermanto Gunawan mendapat 2 suara, 9 suara menolak keduanya, 4 suara abstain, dan 1 suara kosong.

Berdasar laporan Pimpinan Komisi XI tersebut, Rapat Paripurna menyetujui untuk ditetapkan.

Selanjutnya, untuk agenda kedua mengenai pembentukan dua Pansus, yaitu Pansus RUU Panas Bumi dan Pansus RUU tentang Advokat, Rapat Paripurna menyetujui pembentukan dua Pansus tersebut.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Pada 4 September 2013, Komisi VII melakukan Raker dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar ICP, *Lifting* Minyak Bumi, LPG Bersubsidi, Subsidi BBN, Alpha dan Volume serta Besaran Subsidi BBM dalam RUU APBN TA. 2014. Raker ini juga membahas dan menetapkan Asumsi Dasar Subsidi Listrik TA 2014.

Dalam rapat disepakati, antara lain: Asumsi Dasar ICP sebesar 100-115 US\$/barel; Subsidi LGV sebesar 1.500/liter, dan Alpha BBM bersubsidi sesuai dengan formula APBN-P

2013. Selain itu juga disepakati produksi/lifting Migas 870 Ribu BOPD, dan volume BBM dan LPG 48-51 Juta KL. Namun demikian, ada beberapa catatan dari fraksi PDI-P yang mengusulkan lifting minyak bumi sebesar 840-870 Ribu BOPD dan Volume BBM bersubsidi sebesar 48-52 Juta KL. Sementara Fraksi PKS mengusulkan volume Minyak Tanah dibawah 1 Juta KL.

Selain itu, untuk Asumsi Dasar Listrik ditetapkan antara lain: pertumbuhan penjualan listrik 9%; penjualan listrik 204,59Twh; susut jaringan 8,50%; margin usaha 7%. Namun demikian, Fraksi PKS mengusulkan Margin Usahanya dibawah 7%. Komisi VII memberikan kewenangan kepada Badan Anggaran untuk menetapkan angka dari kesepakatan range yang telah ditentukan.

Diplomasi Parlemen

Persiapan pengiriman delegasi DPR RI ke Sidang Umum AIPA ke-34 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Sidang ini akan berlangsung dari tanggal 17 September sampai 23 September 2013. Tema Sidang Umum AIPA kali ini adalah *"The Role of AIPA in Realising the ASEAN Community"*. Bertindak sebagai tuan rumah adalah Parlemen Brunei Darussalam/ *Legislative Council* yang juga menjabat sebagai Presiden AIPA.

DPR RI berpartisipasi penuh dalam Sidang Umum ini dengan mengirimkan 15 anggota DPR RI termasuk lima anggota parlemen perempuan. Delegasi dipimpin oleh Ketua DPR RI, Dr.H. Marzuki Alie. Sidang Umum AIPA ke-34 dibuka oleh Sultan Hassanal Bolkiah dan dihadiri oleh sepuluh parlemen anggota AIPA dan sepuluh observer, diantaranya Australia, Belarus, Canada, People's Republic of China, European Parliament, India, Japan, Republic of Korea, Papua Nugini, Russian Federation. Akan hadir juga undangan tuan rumah diantaranya, Sekjen ASEAN, Sekjen IPU, Representatif dari *Pan African Parliament* dan observer yang akan segera bergabung, yaitu Parlemen Timor Leste.

Sejumlah agenda akan dibahas dalam Sidang-sidang Komisi, yaitu Komisi WAIPA (Women Parliamentarians of AIPA) dengan tema *"Advocating Maternal and Child Health in ASEAN"*, Komisi Politik dengan tema *"Supporting the ASEAN Political Security Community"*, Komisi Ekonomi dengan tema *"Fostering the Growth and Sustainable Development of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)"*, Komisi Sosial dengan tema *"Nurturing the Role of Young People for the Future Challenges of ASEAN"* dan Komisi Organisasi dengan tema yang membahas beberapa agenda.



Dalam Sidang Umum, delegasi DPR RI mengusulkan item tambahan agenda di Komite Politik yaitu; 1. *"Achieving Sustainable Development in ASEAN through Corporate Social Responsibility"*. Indonesia menyoroti pentingnya korporasi dan praktisi bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, 2. *"Promoting the Role of ASEAN Community in the Global Community of Nations"* untuk mempertegas komitmen AIPA dalam mendukung pengukuhan posisi ASEAN di level global.

Pada komite ekonomi, Indonesia mengusulkan item agenda baru dengan tema *"The Role of AIPA in Response to the Challenges of ASEAN Economic Community"*. Kita perlu menekankan kembali komitmen kita secara penuh dan mendukung integrasi ekonomi regional.

Sedangkan pada komite sosial, delegasi Indonesia mengajukan item *"Post 2015 Development Agenda : AIPA's Commitment in Countering the Rising Challenges"*. Kami menyadari bahwa target pencapaian MDG's 2015 sudah semakin dekat. Ada sejumlah target yang telah diraih oleh Asia Tenggara, seperti bidang pendidikan dan kesehatan.

Ketua DPR RI dalam pidatonya mengatakan bahwa seiring semakin dekatnya tenggat waktu 2015, disadari bahwa masih banyak tantangan signifikan yang menghadang, sehingga memerlukan keterlibatan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita tersebut, termasuk dari Parlemen dan seluruh anggota Parlemen di Kawasan. Kelak, tahun 2015 akan menjadi titik peralihan yang bersejarah untuk masyarakat ASEAN. Dan ketika tahun itu tiba, Parlemen harus memastikan bahwa ASEAN benar-benar menjadi komunitas yang menghormati keberagaman dan mendukung kebersamaan sebagai masyarakat ASEAN. Masyarakat yang menggarisbawahi nilai-nilai perdamaian, saling menghormati, persaudaraan dan kerjasama. Disinilah peningkatan peran AIPA sangat dibutuhkan.**



DPR Sampaikan Petisi Wilfrida ke Malaysia

10 Ribu Petisi Dukungan Wilfrida diserahkan langsung kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung untuk disampaikan kepada Presiden RI. "Ini akan kita sampaikan kepada pemerintah dan Parlemen Malaysia sebagai bukti dukungan DPR terhadap Wilfrida," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung usai menerima perwakilan Migrant Care, dan pemuka agama, di Gedung Nusantara II, Kamis, (19/10).

Menurut Pramono, ini merupakan dukungan politis DPR RI sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat kecil. "Pimpinan juga akan mengirim surat kepada Kemenakertrans, Kemenlu dan laporan ini akan dibawa kepada rapat pimpinan guna mengirim anggota Parlemen ke Malaysia untuk melihat langsung proses peradilan disana," ujarnya.

Dia menambahkan, dukungan ini mengedepankan aspek kemanusiaan pasalnya, Wilfrida masih belum cukup umur saat diberangkatkan dan tulang punggung keluarga besar dikampungnya.

Anggota DPR dari PDIP Rieke Dyah Pitaloka mengatakan, dirinya berharap petisi dukungan terhadap Wilfrida juga menjadi bagian perjuangan DPR. "Saya minta berulang kali agar perlindungan dan pendampingan hukum buat Wilfrida lebih dioptimalkan dan semua proses persidangan disampaikan kepada publik di tanah air," ujarnya.

Menurutnya, desakan dari segelintir orang saja tidak cukup, dan kita memerlukan lebih banyak suara dan teriakan kepada pemerintah untuk bertindak menyelamatkan Wilfrida. "Barangkali bagi pemerintahan SBY seorang gadis belia, korban perdagangan manusia bernama Wilfrida tak ada artinya sepertinya bagi SBY konvensi Capres lebih berarti," tandasnya.

Dia menambahkan, apa yg dilakukan saat ini bukan hanya sekedar gerakan politik tetapi gerakan yg mengedepankan kemanusiaan. "Nanti kita juga akan mengantarkan petisi ke acara Konvensi Partai Demokrat," terangnya.

Penggalang dukungan Wilfrida dari Change.org, Usman Hamid mengatakan, kita semua akan mengupayakan dukungan resmi dari PBNU, KWI dan Muhammadiyah berbentuk surat untuk dikirimkan kepada Presiden. "Kita ingin semua warga Malaysia dan Indonesia sama-sama menanda-

tangani petisi ini," ujarnya.

Usman menambahkan, kemiskinan merupakan salah satu sebab utama Wilfrida bekerja keluar negeri untuk menghidupi keluarga besarnya.

Sementara Perwakilan KWI, Romo Beny Susetyo mengatakan, keuskupan akan segera mengirim surat kepada komunitas internasional meminta dukungan mencabut hukuman mati Wilfrida. "Ini merupakan dukungan lintas agama, dan seharusnya pemerintah berkewajiban menjaga rakyatnya, yang kita minta harus diupayakan jalur diplomasi langsung ke Pemerintah Malaysia," katanya.

Dia mengharapkan pemerintah serius menanggapi persoalan Wilfrida. Karena kasus Wilfrida merupakan salah

satu korban kemiskinan dan struktur penindasan. "Ini menjadi dosa kita semua dan kita mengupayakan banding demi martabat manusia," ujarnya.

KH. Maman Imanulhaq dari NU mengatakan Wilfrida adalah buruh migran Indonesia yg menjadi korban karena ditempatkan sebagai komoditas oleh Pemerintah Malaysia bahkan pemerintahnya sendiri Indonesia.

Wilfrida didakwa atas pembunuhan melanggar pasal 302 Penal Code Kanun Keseksaan, Malaysia dengan hukuman maksimal pidana mati. Buruh migran ini belum genap 17 tahun saat dikirim ke Malaysia. Ia menyatakan aksinya merupakan upaya pembelaan diri dari kekerasan majikan, Wilfrida kerap menerima amarah dan pukulan bertubi-tubi. (si) Foto: iwan armanias/parle.

AIPA Beri Perhatian Optimal Pada Kesehatan Ibu dan Anak

Rancangan Resolusi pada Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak di ASEAN menjadi tema Sidang Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 17-23 September 2013. Sidang WAIPA diikuti oleh 10 Negara ASEAN, tak terkecuali Indonesia.

Delegasi Indonesia diwakili Anggota BKSAP DPR Okky Asokawati, Vanda Sarundajang, Selina Gita dan Ida Ria Simamora. Sidang dibuka langsung oleh Presiden ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) ke-34 Dato Laila Utama Haji Awang Isa Bin Pehin Datu Perdana, dan didampingi oleh Sekjen AIPA Periowsamy Otharam.

Usai rapat WAIPA, Anggota BKSAP Ida Ria Simamora menyatakan bahwa dirinya dalam rapat mengusulkan adanya satu penguatan untuk MDGs yang ke-4 dan ke-5 yang menangani kesehatan ibu dan anak. Selain itu, ia mengusulkan bahwa AIPA sendiri harus memberikan perhatian yang optimal kepada masalah kesehatan ibu dan anak.

"Kita tekankan bahwa substansinya ibu dan anak harus diprioritaskan. Kita juga menargetkan masalah kesetaraan dibahas dalam rapat. Jadi tidak ada perbedaan, dimana fokusnya wanita dan anak-anak diberikan perhatian khusus masalah kesehatan," ujar Anggota Komisi VI ini, saat ditemui Parle,



Foto bersama delegasi wanita Parlemen ASEAN (WAIPA) se usai pembukaan sidang WAIPA 17-23 September di Brunei.

usai rapat.

Politisi Demokrat ini menegaskan bahwa kesetaraan gender ini adanya keadilan bukan hanya pada kesehatan, tetapi juga penyakit-penyakit yang *communicable* dan jenis penyakit yang sulit disembuhkan. Selain itu, ia juga mengusulkan untuk ibu dan anak agar diberikan fasilitas, baik sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur untuk menciptakan hidup yang sehat.

"Kita inginkan ada kesepakatan diantara *Member of Parliament* ASEAN agar lebih memperhatikan kesehatan

ibu dan anak. Kita targetkan dari beberapa peserta memberikan masukan yang arahnya menyetujui usulan ini. Resolusi ini juga akan kita bawa ke forum lagi, dan akan digabungkan dengan beberapa resolusi lain diantaranya masalah politik, ekonomi dan sosial budaya," jelas Ida.

Terkait dengan usulan ini, Ida mengakui, delegasi negara lain sangat mendukung. Bahkan, ini merupakan salah satu terobosan di Sidang WAIPA dalam rangka mendapatkan standar hidup yang baik untuk fokus hidup yang sehat. (hr, sf) Foto: eka hindra/parle.

Komisi III Desak Polri Tingkatkan Kinerja Intelejen

Teror penembakan yang diarahkan kepada aparat kepolisian berseragam dinilai telah mengganggu rasa aman yang ada ditengah masyarakat. Kinerja intelejen Polri yang seharusnya dapat mengantisipasi hal ini dipertanyakan.

“Ini soal rasa aman masyarakat yang tiba-tiba hilang. Dimana para intelejen polri? Kalau prajurit berseragam saja takut bagaimana dengan yang tidak. Saya belum mendengar langkah tegas, keras untuk menggulung aksi teror ini,” kata anggota Komisi III Bambang Soesatyo dalam rapat kerja dengan Kapolri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/13).

Ia menyebut sejumlah spekulasi merebak pasca terror, diantaranya aksi ini adalah upaya mengganggu pemilu atau langkah sejumlah pihak yang sakit hati. Baginya isu yang beredar ini harus diredam Polri dengan segera menyampaikan kepada publik sejumlah langkah tegas yang sudah diambil.

Sementara itu anggota Komisi III dari FP Hanura, Susaningtyas N. Handayani mengingatkan agar Kabid Humas Mabes Polri tidak larut seperti pengamat dalam menyampaikan informasi perkembangan kasus teror penembakan pada publik. “Kabid Humas jangan larut seperti pengamat dalam menyebutkan nama tersangka, sampaikan semua berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan,” tegas pakar intelejen ini.

Dalam pertemuan tersebut Kapolri Jenderal Timur Pradopo menerangkan perkembangan penyelidikan kasus penembakan sudah mengarah pada kelompok teror yang dikendalikan oleh Abu Roban. Sejauh ini dua orang sebagai



Anggota Komisi III Bambang Soesatyo berjabat tangan dengan Kapolri Timur Pradopo.

tersangka sudah ditetapkan sebagai DPO. “Kita sedang bekerja keras untuk mengungkap kasus ini dan kita tidak menyerah,” tekannya.

Rapat menyimpulkan sejumlah hal diantaranya mendesak Kapolri supaya lebih tegas dan cepat menuntaskan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat seperti penembakan terhadap anggota Polri, peredaran narkoba di lapas dan kasus-kasus lain.

“Kapolri perlu meningkatkan kinerja intelijen dan kemampuan koordinasi dengan intelijen instansi lain dengan mengintensifkan langkah preventif dan promotif sehingga mampu mendeteksi dini dan mengantisipasi potensi konflik horizontal,” kata Tjatur Sapto Edi, Wakil Ketua Komisi III yang memimpin jalannya sidang. *(iky)foto:wahyu/parle/wy*

Komisi X Minta Trowulan Sebagai Kawasan Budaya

Komisi X DPR RI meminta pemerintah agar Trowulan dijadikan kawasan budaya sebagai bentuk pelestarian Kerajaan Majapahit.

“Saat ini wilayah Trowulan memang masih memiliki peninggalan bersejarah dari Kerajaan Majapahit,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi X, Agus Hermanto disela-sela kunjungannya ke Museum Trowulan, di Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (12/9)

Oleh karena itu, menurutnya, peninggalan Kerajaan Majapahit di Trowulan Mojokerto harus terus dilestarikan ke-

beradaannya sebagai pusaka bangsa.

“Di Trowulan ini memang masih banyak yang harus ditingkatkan salah satunya pembuatan kawasan budaya tersebut,” ujar Agus.

Dengan adanya kawasan budaya, kata Agus, maka seluruh kebudayaan yang ada di kawasan Trowulan ini bisa dilestarikan termasuk seluruh kebudayaan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Majapahit.

Ia mencontohkan, seperti kawasan Bubat yang sebelumnya terkenal se-

bagai tempat pelatihan para prajurit Majapahit kini menjadi ladang tebu.

“Oleh karena itu, pembentukan kawasan budaya ini memang perlu dilakukan menyusul masih banyak aset di kawasan Trowulan ini yang harus ditingkatkan,” katanya.

Agus menjelaskan, bahwa kunjungan spesifik Komisi X ke Trowulan adalah kunjungan khusus untuk mengetahui secara langsung kawasan budaya yang ada di Trowulan.

Menurutnya, kebesaran sejarah



Tim Kunjungan Spesifik Komisi X dipimpin Ketua Komisi Agus Hermanto mengunjungi Museum Trowulan, di Mojokerto, Jawa Timur.

peradaban di Indonesia dan nusantara harus ditilik dari sudut kekinian. “Tugas kita untuk tidak mengabaikannya,” kata politisi Partai Demokrat ini.

“Makanya kami perlu tahu batas wilayah yang masuk cagar budaya di Trowulan biar jelas. Selama ini masih bias. Belum ada gambaran yang lebih jelas. Kami juga belum mendapatkan gambaran ini,” katanya.

Sebelumnya disebutkan secara umum, kawasan cagar budaya Trowulan sepanjang 11 KM persegi.

Namun diakui, masih banyak yang bisa dikembangkan dari keberadaan kawasan budaya Trowulan. Ada muse-

um, candi, dan berbagai situs budaya ada di wilayah ini. Semua harus dilestarikan dan dikembangkan.

Kawasan ini harus dikembangkan sehingga memberi kemakmuran masyarakat dan menjadi sumber devisa. Negara yang bertugas menciptakannya.

“Harus terus digali anggaran yang bersumber pada APBN untuk pengembangan budaya ini. Semua harus fokus dan tepat sasaran,” tambah Agus.

Selain ke Museum Majapahit, Tim Komisi X melanjutkan kunjungan, melihat situs-situs budaya. Mulai dari Candi Bajang Ratu dan Candi Tikus.

Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan, Aris Sofyan mengatakan, saat ini pemerintah sedang mendayagunakan masyarakat setempat untuk beralih profesi dari pembuat batu bata menjadi pemandu wisata di Trowulan.

“Kami berharap dengan adanya dorongan dari pemerintah ini akan memberikan efek positif bagi perkembangan kawasan Trowulan untuk lebih baik lagi kedepannya,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini lebih dari tiga ribu tempat pembuat bata (linggan) yang ada di sekitar Trowulan.

“Dari masing-masing tempat pembuatan tersebut diisi oleh tiga sampai dengan lima orang tenaga kerja,” katanya.

Oleh karena itu, mereka nantinya akan diberdayakan dengan dijadikan sebagai pemandu wisata atau juga pengantar para wisatawan yang datang ke Trowulan.

“Dengan demikian para wisatawan tersebut akan terbantu adanya para pemandu wisata yang datang ke lokasi wisata Majapahit,” imbuhnya. (sc) foto:sc/parole/wy

Perlunya Profesionalitas Dalam Pengelolaan Perpustakaan Daerah

Banyak pengelolaan perpustakaan daerah yang tidak berkompeten dibidangnya. Hal tersebut diungkapkan ketua Tim Panja Pengembangan Perpustakaan Komisi X DPR RI, Asman Abnur dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dalam pertemuan dengan Kadin Dikbud dan Kepala Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulteng, di Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Sulteng, Kamis (12/9).

“Bagaimana perpustakaan menjadi daya tarik kalau pengelola perpustakaannya tidak berkompeten di bidang itu, rasanya tidak mungkin,” kata Asman.

Perpustakaan menjadi tulang punggung kemajuan yang sekaligus menolong pendidikan kita. Kondisi saat ini, dari jika dikumpulkan 100 orang, yang memiliki minat baca hanya satu orang saja. Berbeda dengan negara lain, Singapura misalnya, jika dari 100 orang yang minat baca itu 55 orang, sedangkan Malaysia minat baca 25 orang dari 100 orang.



Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur menerima cinderamata dari Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Provinsi Sulteng, Irwan Lahace.

Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan, oleh karena itu ditambahkan Asman perlunya pengelolaan perpustakaan daerah yang betul-betul profesional. Agar Perpustakaan dapat menjadi kebanggaan daerah tersebut.

Untuk mewujudkan pengelolaan perpustakaan yang profesional itu harus dengan penciptaan orang yang benar-benar ahli di bidang perpustakaan, diantaranya dengan pendidikan dan pelatihan.

Asman mengatakan keinginannya untuk menjadikan perpustakaan menjadi icon nasional dan icon daerah. Dengan kata lain perpustakaan tidak hanya seperti tempat simpan buku, melainkan menjadi pusat informasi.

“Jadi jangan menganggap perpustakaan itu hanya sebagai tempat menyimpan buku-buku bekas tapi perpustakaan menjadi pusat informasi, pusat kegiatan dan diskusi,” kata Asman.

Salah satu cara untuk merubah per-

pustakaan sebagai tempat menumbuhkan daya tarik dan minat baca adalah dengan memberikan pelayanan yang sifatnya jemput bola. Jika perlu setiap mall yang ada di kota Palu ada perpustakaan daerah, begitu juga dengan di bandara.

“Tantangan kita semua, Insya Allah bangunan dan infrastrukturnya nanti menjadi tanggungjawab DPR RI untuk memperjuangkan sebahagiannya dari APBN, yaitu melalui perpustakaan nasional. Itu yang menjadi target kita, dan ini menjadi perjuangan kita bersama,” jelasnya.

Senada dengan Asman, Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulteng, Irwan Lahace juga mengatakan akan pentingnya penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Oleh karena itu pemerintah Sulawesi Tengah telah membentuk kelembagaan perpustakaan sebagaimana peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Direktorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Sulawesi Tengah. Termasuk didalamnya Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Merujuk pada UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan maka penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan sesuai dengan amanat UU,” jelas Irwan.

Irwan yang pada kesempatan tersebut mewakili Gubernur Sulawesi Tengah menghimbau kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta kepada Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera merumuskan konsep kerjasama dalam rangka harmonisasi program dan kegiatan pengembangan taman bacaan masyarakat, yang pada akhirnya akan ikut menumbuhkan minat baca di masyarakat. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Setujui DGS BI Pilihan Komisi XI

Rapat Paripurna hari Selasa (17/09) menyetujui Mirza Adityaswara untuk menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI). Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini berhasil mengungguli pesaingnya, Anton Hermanto Gunawan.

Dalam laporannya, Ketua Komisi XI Olly Dondokambey menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan Rapat Komisi untuk melakukan proses pengambilan keputusan sehari sebelumnya (16/09). Komisi yang menangani Keuangan dan Perbankan ini menyepakati pengambilan keputusan melalui mekanisme suara terbanyak atau voting.

“Setelah dilakukan pemungutan suara, yang diikuti oleh 48 anggota yang hadir dan dilakukan pemungutan suara, Komisi XI menyepakati untuk memilih saudara Mirza Adityaswara menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia untuk mengisi kekosongan jabatan DGS BI,” papar Olly di Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, di Gedung Nusantara II.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, hasil penghitungan suara secara lengkap adalah Mirza Adityaswara mendapatkan 32 suara, sedangkan Anto Hermanto meraih 2 suara. Selain itu, ada 9 suara menolak kedua calon, 4 suara abstain, dan kertas suara kosong sebanyak 1 suara.



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman memberikan ucapan selamat kepada Mirza Adityaswara sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yang baru.

“Komisi XI telah melakukan RDP dan RDPU dengan PPATK dan pakar/pengamat ekonomi untuk mendapatkan masukan dan informasi terkait dua calon pada 2 September 2013. Tanggal 3 September, Komisi XI juga telah melakukan RDPU dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan terhadap

dua calon,” papar Politisi asal Dapil Sulawesi Utara ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 15 Agustus 2013 Presiden telah mengusulkan dua nama calon DGS BI untuk mengisi kekosongan DGS BI. Sebelumnya, posisi ini dijabat oleh Darmin Nasution, namun karena Darmin diangkat menjadi Gubernur BI, maka jabatan DGS menjadi kosong.

Menanggapi terpilihnya Mirza, Anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam menyatakan bahwa DGS BI terpilih harus mampu bekerja keras dan mengkonsolidasi tim Dewan Gubernur BI.

Selain itu, dengan bertambahnya tim Dewan Gubernur, dapat memberi energi baru untuk BI.

“Tim Dewan Gubernur BI harus mampu meyakinkan pasar, bahwa BI mampu mengatasi tekanan moneter ini. Kenapa baru sekarang kekosongan ini diisi? Posisi DGS BI itu penting, apalagi sekarang lagi ada gonjang-ganjing kondisi ekonomi. Saya berharap, penambahan DGS ini dapat menambah energi baru untuk tim Dewan Gubernur BI,” harap politisi PKS ini.

Ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna, DGS BI terpilih Mirza me-

nyatakan belum bisa berkomentar banyak terkait posisinya di BI. Ia mengaku masih menunggu pelantikan dan Keputusan Presiden.

“Terimakasih kepada pemerintah dan DPR yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Masih menunggu pelantikan, Keppres, dan Mahkamah Agung. Jadi mungkin beberapa hari atau beberapa minggu ke depan baru resmi jadi Deputy. Saya belum bisa memberikan pendapat sebagai Deputy Gubernur Senior BI,” jelasnya saat ditemui para wartawan. (sf)foto:wahyu/parle/wy

Perlu Sinergi untuk Bangun Perpustakaan Khusus

Perpustakaan khusus yang berfungsi sebagai pusat referal dan penelitian serta sarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas lembaga atau instansi mempunyai tantangan tersendiri dalam pengembangannya. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti saat menjadi pembicara kunci dalam forum diskusi dan koordinasi yang diikuti 100 pustakawan dari Kementerian dan Lembaga Negara.

“Forum ini diharapkan dapat membangun sinergi, *networking*, *sharing* pengalaman dan pengetahuan untuk membangun perpustakaan khusus di institusi dan lembaga masing-masing,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/13).

Ia berbagi pengalaman saat menata Perpustakaan DPR, anggota dewan sebagai pemustaka utama sering menyampaikan kritikan terhadap pelayanan yang diberikan. Kondisi ini menjadi cambuk bagi para pustakawan untuk memberikan pelayanan lebih baik.

“Anggota DPR adalah pejabat negara yang sangat sibuk. Itulah sebabnya penting menyediakan koleksi yang benar-benar mereka perlukan. Jeli membaca kebutuhan mereka,” lanjutnya.



Sekjen DPR Winantuningtyastiti memberi cinderamata kepada pembicara Forum Diskusi dan Koordinasi Antar Perpustakaan Kementerian/Lembaga.

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi Setjen DPR, Damayanti dalam kesempatan itu melaporkan Perpustakaan DPR mengembangkan layanan baru diantaranya klipng dan katalog *online*. Perpustakaan parlemen yang dirintis sejak era penjajahan Belanda ini, telah memiliki 105.784 koleksi serta 406 koleksi *ebook* yang dapat diakses dengan komputer dan telepon genggam.

Sementara itu pembicara Dharma Gustiar Baskoro dosen dan *librarian* dari Universitas Pelita Harapan mengingatkan pengelola perpustakaan khusus harus fokus mengembangkan informasi yang dibutuhkan untuk

para pengambil keputusan. “Mereka cenderung tidak punya banyak waktu untuk riset, informasi yang dibutuhkan biasanya dalam paket data, lebih menyukai informasi *online*. Perlu dipahami kebutuhan pengguna, kalau tidak kita akan ditinggalkan,” tekannya.

Ia juga menyayangkan perkembangan dunia kepastakaan di tanah air sudah jauh tertinggal dari negara tetangga yang sebenarnya dahulu belajar di Indonesia. “Sampai saat ini kita baru punya satu profesor di bidang ilmu kepastakaan. Malaysia yang dulu belajar disini sekarang sudah punya lebih banyak profesor,” demikian Dharma. (iky)foto:rizka/parle/iw.

DPR Sahkan Pembentukan Dua Pansus

Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/09) yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menyetujui pembentukan dua pansus, yaitu Pansus RUU tentang Advokat dan Pansus RUU tentang Panas Bumi.

Keanggotaan Pansus RUU Panas Bumi berjumlah 30 orang, terdiri dari F-PD sebanyak 8 orang, F-PG 6 orang, 5 orang dari F-PDIP, F-PKS 3 orang, dan masing-masing 2 orang dari F-PAN, F-PPP, dan F-PKB. Serta masing-masing 1 orang dari F-Gerindra dan F-Hanura. Sedangkan, pansus RUU Advokat, berjumlah 30 orang dengan komposisi sama dengan keanggotaan Pansus RUU Panas Bumi.

Berikut adalah daftar nama untuk Pansus RUU tentang Panas Bumi, dari F-PD, yaitu I Wayan Gunastra, Juhaini Alie, Teuku Irwan, Sutan Sukarnotomo, Dalimi Abdullah DT Indokayo, Siti Romlah, Efi Susilowati, dan Iman Tjahya Abdullah. Kemudian Zainudin Amali, Dito Ganinduto, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Bobby Adhityo Rizaldi, S.W Yudha, dan Halim Kala dari F-PG.



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman.

Selanjutnya dari F-PDI-P, ada Nazarudin Kiemas, Daryatmo Mardiyanto, Irvansyah, Djuwanto, Dewi Aryani Hilman. Dari F-PKS Rofi' Munawar, Muhammad Idris Luthfi, dan Nabel Al Musawa. Mewakili F-PAN, ada Alimin Abdullah dan Mohammad Syafrudin.

Kemudian, F-PPP mengirim Usman Ja'far dan Tommy Adrian Firman. Muawiyah Ramli dan Mohammad Toha mewakili F-PKB. Dari F-Gerindra Mul-

yadi dan F-Hanura Ali Kastela.

Sedangkan, untuk nama anggota pansus tentang RUU Advokat, yaitu; dari F-PD adalah Edi Ramli Sitanggang, Marcus Silanno, Ruhut Poltak Sitompul, Harry Witjaksono, Subyakto, Himmattul Aliyah Setyawati, Dhianna Anwar, Muslim. Kemudian dari F-PG adalah Aziz Syamsudin, M Ade Supriyatna, Nudirman Munir, Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ, Mahyudin, Deding Ishak.

F-PDIP mengirim Trimedia Panjaitan, Sayed Muhammad Muliadi, Hendrawan Supratikno, M Nurdin, Ichsan Sulistio. Adang Daradjatun, Nasir Djamil, dan Indra mewakili F-PKS. F-PAN diwakili Muhajir dan Herman Kadir.

Ahmad Yani dan Dimiyati Natakusumah dari F-PPP. Kemudian dari F-PKB adalah Chusnunia Chalim dan Bahrudin Nasori. Desmond Junaidi Mahesa mewakili F-Gerindra dan Sarifuddin Suding dari F-Hanura. (mp,sf)/foto:wahyu/parle/iw.

Perlu Kemandirian Irjen Untuk Kawal Pengimplementasian SPIP

Keterlibatan dari para Irjen di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) seharusnya dimulai dari perencanaan program, pelaksanaan hingga evaluasi hasil dari program yang telah dijalankan. Jika dimulai dengan perencanaan yang baik tentu kerugian negara atau korupsi dapat dicegah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI, Sumarjati Aryoso saat RDP dengan para Irjen dari beberapa K/L, Kamis (19/9).

"Ternyata ditemukan begitu banyak kerugian negara dan potensi kerugian negara dikarenakan lemahnya sistem pengendalian internal," jelas Sumarjati.

Irjen di Kementerian/Lembaga sebagai bagian dari APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) sebagaimana yang diamanatkan oleh PP.60 Tahun 2008 menjadi pihak yang mengawal implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern



Ketua BAKN DPR Sumarjati Aryoso.

Pemerintah). Irjen sebagai pengawas internal itu harus dimulai sejak perencanaan program, pelaksanaan hingga pada evaluasi hasil program tersebut. Dengan begitu ditambahkan politisi dari Fraksi Gerindra ini, kerugian negara atau korupsi bisa dicegah.

“Saat ini seharusnya setiap anggaran berbasis pada kinerja. Apakah kinerjanya tercapai atau tidak, hal tersebut berawal sejak perencanaan program, apakah sudah ditata dengan baik atau belum. Setelah itu pelaksanaan dan kemudian hasil yang dicapai dari program tersebut. Dengan begitu kerugian negara atau korupsi bisa dicegah. Pencegahan ini akan meminimalisir kerugian negara, karena jika sudah terlanjur dikorupsi atau terlanjur hilang, kembalinya uang negara tersebut tentu akan lebih sulit,” papar Ketua BAKN ini.

Ditambahkan Sumarjati, disinilah diperlukan kemandi-

rian dari para Irjen, tentunya kemandirian yang fungsi dan tanggung jawabnya diatur oleh Undang-undang, sehingga dapat menjadi Orientasi Penguatan APIP di masa yang akan datang.

Selain itu BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) pun diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh atas efektifitas dan implementasi SPIP dan peran APIP. Sehingga sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 45 mencapai kecerdasan bangsa dan tercapainya kesejahteraan umum pun dapat terwujud. (ayu) Foto:ry/parle.

Pembahasan Anggaran Kemenhan Sangat Terbuka

Menyusul kritik tajam dari banyak LSM atas pembahasan anggaran pertahanan yang cenderung manipulatif, Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya (F-PG) membantah semua tuduhan itu. Selama ini, Komisi I sangat transparan membahas anggaran pertahanan dalam rapat terbuka.

“Itu tidak benar. Di periode kita sekarang ini, tidak ada pembahasan tertutup. Justru di periode kita ini, pembahasan mengenai anggaran dari kementerian/lembaga yang menjadi mitra komisi I termasuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan), kita buat secara terbuka dan transparan,” tegasnya saat ditemui sebelum Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/9).

Tak ada upaya menutup-nutupi anggaran di Kemenhan. Rapat yang digelar Komisi I selalu terbuka. Yang tertutup, katanya, hanya rapat dengan

Badan Intelijen Negara (BIN). Tantowi menuturkan, Komisi I membahas anggaran pertahanan secara detail hingga ke sub-sub alokasi pengadaan.

Soal daya kritis Komisi I yang dinilai lemah oleh LSM dalam membahas anggaran, Tantowi menyangkalnya pula. “Saya kira tidak. Malah ada beberapa anggaran yang kita bintang cukup lama. Itu menunjukkan keseriusan dan ketelitian kita. Kita, kan, boleh masuk ke satuan 3 secara detail.”

Justru, lanjut Tantowi, daya kritis Komisi I yang begitu detail membahas anggaran pertahanan, kadang membuat pihak pemerintah jengkel. Komisi I tentu punya kepentingan mengetahui detail kebutuhan anggaran sektor pertahanan.

“Itu yang kadang-kadang bikin kesel pemerintah, seolah-olah kita



Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya.

mau tau soal detail anggaran. Tapi itu, kan, amanat UU. Kita tidak bisa lagi menerima anggaran dalam bentuk satuan-satuan besar. Enggak bisa. Kita sekarang sudah masuk ke detail. Peruntukan anggaran sekian itu akan dibeli apa kita harus tahu semuanya,” kilah Tantowi. (mh)/foto:odjie/parle/iw.

Ketua BK : DPR Jangan Lagi Mengurus Satuan Tiga

DPR jangan mengurus lagi Satuan 3 atau program dan proyek. Ini yang paling berpotensi terjadi korupsi. Masak DPR membahas urusan got atau gorong-gorong. “Yang saya ketahui pertemuan antara Wakil Ketua DPR Pramono Anung dengan Ketua KPK agar dewan terhindar dari korupsi ada dua masalah yaitu bidang legislasi dan anggaran,” ujar Ketua Badan Kehormatan DPR Trimedya Panjaitan

kepada pers Selasa (17/9) menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja bahwa DPR merupakan lembaga terkorup kedua setelah kepolisian.

Untuk itu kata politisi PDI Perjuangan ini, dua hal itulah yang harus diperbaiki. Misalnya yang jelas DPR jangan sampai mengurus sampai Satuan 3 yaitu proyek. “DPR dalam fungsi anggaran

membahas makronya saja, misalnya di Komisi III yang bermitra kerja dengan Polri yang dibahas masalah penyidikan berapa anggarannya lalu untuk bidang serse berapa.

Menurut Trimed, pengaturan mengenai kewenangan DPR hanya membahas Satuan 3 diatur dalam RUU Keuangan Negara. Masalah kewenangan ini juga sedang diajukan uji materi di



Ketua BK DPR Trimedya Panjaitan.

Mahkamah Konstitusi oleh beberapa LSM, bahkan mereka lebih ekstrem lagi bahwa DPR tidak lagi mengurus

anggaran. “Saya kira bahas anggaran boleh, tetapi jangan sampai satuan tiga,” tegasnya lagi.

Dia yakin, bila ini dilakukan peringkat DPR dalam masalah korupsi akan berada di luar 10 besar, kalau diadakan survey lagi. Sebaliknya kalau masih terjadi lagi, bisa jadi masuk 5 besar.

Menanggapi penilaian sebagai lembaga terkorup kedua ini, secara periodik pihaknya melakukan pertemuan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi. “Pemahaman saya, kunci dari anggota DPR adalah Pimpinan Fraksi. Tentu Pimpinan Fraksi berkomunikasi dengan Pimpinan parpol masing-masing,” ungkapnya.

Ruang gerak Badan Kehormatan, lanjut Trimedya, hanya pada tiga hal jika ada pengaduan, tersangkut masalah hukum dan kontrol absensi. Karena itu, dalam reses lalu, soal absensi diserahkan ke masing-masing fraksi.

Saat didesak apa langkah DPR sehingga tidak disebut lembaga terkorup kedua, menurut Trimedya, mendorong dalam RUU Keuangan Negara, DPR jangan sampai mengurus Satuan 3. Selain itu, Pimpinan parpol tidak usah menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) dan bila ada pengaduan masyarakat, maka Pimpinan Parpol proaktif memindahkan anggotanya dari alat kelengkapan dewan (AKD) yang melakukan korupsi. (mp)/foto:odjiele/parle/iw.

RUU Pilpres Perlu Dibawa Ke Paripurna Supaya Ada Kepastian

Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja menegaskan, agar segera ada kepastian mengenai nasib RUU Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) maka posisi RUU tersebut di Badan Legilasi (Baleg) segera dilaporkan ke Rapat Paripurna. Pembahasan yang berhenti di Baleg dilaporkan ke Badan Musyawarah lalu dibawa ke Sidang Paripurna, lalu diambil keputusan untuk segera diputuskan apakah dilanjutkan revisi atau dihentikan.

“Kalau bisa diambil keputusan melalui musyawarah, kalau tidak bisa melalui pemungutan suara (*voting*), sehingga ada kepastian,” jelasnya kepada wartawan sebelum mengikuti rapat paripurna DPR Selasa (17/9).

Menjawab pertanyaan mengenai pendapat Fraksi PAN atas RUU Pilpres, politisi Fraksi PAN ini menyatakan peraturan Pilpres yang lama masih bisa digunakan. Artinya masih sesuai dengan kondisi sekarang dan segera ada pengurangan dan partai-partai mulai membangun kebersamaan dengan berkoalisi.

Sementara itu anggota F-PPP DPR RI Irgan Chairul Mahfiz mengkhawatirkan partisipasi dalam Pilpres akan rendah bila tidak dilakukan perubahan atas UU Pilpres lama terutama menyangkut besaran *presidential threshold*. “Partisipasi Pilpres akan rendah kalau ukuran ambang batasnya 20%. Oleh karenanya biar pilihan masyarakat semakin banyak, kalau bisa ya tanpa batasan,” katanya

Irgan berharap, semua partai yang masuk parlemen bisa mengajukan kandidat presidennya sendiri. “Bisa jadi semua partai yang terpilih, yang duduk di DPR itu memungkinkan mengajukan calonnya sendiri. Katakanlah sama antara *presidential threshold* dengan *parliamentary threshold* 3,5%.



Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja.

Saya kira itu bisa 9 calon. Dengan pilihan yang banyak, masyarakat juga bisa menentukan yang terbaik,” kilah Irgan

Menanggapi KPU yang merasa terganggu dengan ketidakpastian pembahasan RUU Pilpres ini, ia menyatakan, KPU tak perlu khawatir. KPU hanya instrumen penyelenggara Pemilu. Tinggal mengikuti saja keputusan pemerintah dan DPR. “Kalau persoalan-persoalan teknis, kan, bisa disesuaikan dengan keputusan politik yang dibangun,” jelasnya. (mp,mh) Foto:od/parle.

Dewan Harap Dengan UU Keperawatan Pelayanan Kesehatan Jadi Merata



Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf dalam acara Forum Legislasi.

RUU Keperawatan yang sedang dibahas di DPR RI sekarang ini berangkat dengan spirit nasionalisme, di mana banyak daerah terpencil yang tidak memiliki tenaga perawat, sehingga kurang mendapat perhatian yang memenuhi standar. Karena itu dengan UU Keperawatan, diharapkan terjadi pemerataan pelayanan bagi masyarakat khususnya di daerah terpencil.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf, Staf Ahli Menteri Kesehatan, Budi Sampurna dan Sekjen PP PPNI, Harif Fadilah dalam Forum Legislasi tentang RUU Keperawatan di Press Room, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/9)

Menurut Nova, jumlah yang terbatas menyebabkan banyak akademi perawat yang tidak terstandarisasi, dan banyak perawat yang dikriminalisasi akibat salah penanganan medis.

“Maka dari itulah yang menjadi spirit perlunya pemerataan pelayanan bagi masyarakat khususnya di daerah-

daerah terpencil,” tegas Nova.

Ia menjelaskan, dengan UU Keperawatan ini, nantinya tenaga perawat akan mendapat khusus keperawatan yang diharapkan bisa membantu secara profesional. Selain itu, nantinya perawat mendapat pelimpahan wewenang dari untuk menjalankan tugas-tugas kedokteran ketika tidak ada atau dalam waktu darurat. “Karena itu RUU ini harus disahkan selambat-lambatnya pada akhir 2013 ini,” ujar Nova.

“Indonesia memerlukan tenaga perawat yang luar biasa, mengingat selama ini terpusat di kota-kota besar termasuk tenaga sendiri. Untuk itu RUU Keperawatan ini menjadi prioritas sejak tahun 2012 dan harus segera disahkan. Tak perlu khawatir dengan RUU Keperawatan tersebut karena secara akademis memang dibutuhkan mendesak,” papar politisi Partai Demokrat.

Sementara, Staf Ahli Menteri Kesehatan, Budi Sampurna menjelaskan jika RUU Keperawatan tak akan berbenturan dengan UU Kedokteran dan UU sejenis. Karena hanya akan mengatur dari sisi profesi pekerjaan, dan pendidikannya meliputi praktek, sanksi administratif, pembinaan dan sebagainya.

Khusus pendidikannya, jelas Budi, pengajarnya dosen perawat, dan atau perawat yang sudah diangkat menjadi dosen keperawatan.

“Jadi, dalam keperawatan ini tak ada yang namanya konsultan, melainkan tetap dosen. Tapi, yang terpenting pemerataan pelayanan perawat di daerah-daerah di tengah sulitnya anggaran untuk mencetak tenaga profesional,” pungkasnya. (as)/foto:odjie/parle/iw.

TVRI dan RRI Diminta Sosialisasikan Kegiatan Pencapaian Swasembada Pangan

Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan intensitas tanaman pangan, perlu adanya dukungan sosialisasi untuk kepentingan negara dari lembaga penyiaran yang mengemban tugas menyelenggarakan penyiaran, mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencerdaskan, dan memberdayakan serta mendorong kreatifitas masyarakat serta mendorong kemajuan kehidupan masyarakat, yaitu TVRI dan RRI.

Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere menginginkan Lembaga Penyelenggara Penyiaran TVRI dan RRI ikut memberikan pengetahuan kepada Rakyat Indonesia mengenai peningkatan hasil pangan untuk tercapainya swasembada pangan. TVRI dan RRI memiliki jangkauan siar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia. “TVRI dan RRI diharapkan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian mensosialisasikan program pemerintah dalam pencapaian keta-



Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere.

hanan pangan,” Daeng Sere, anggota Dewan yang membidangi bidang komunikasi dan informasi, di Gedung DPR RI, Selasa (17/9)

Daeng Sere meminta kepada TVRI dan RRI memberikan tayangan program pembelajaran dan pendidikan dalam mendukung pencapaian swasembada, mendukung swasembada gula, mendukung swasembada daging, pengembangan komoditas strategis lainnya, pengembangan Lembaga mandiri yang mengakar di Masyarakat (LM3), pengelolaan pupuk dan alat-alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta pengawalan dan pendampingan pe-

nyuluh.

“TVRI dan RRI harus ikut serta mensosialisasikan kegiatan-kegiatan utama pencapaian swasembada, misalkan saja, Optimalisasi Lahan dan Sistem Penyuluhan Pertanian,” Daeng Sere asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1 yang meliputi Kabupaten Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, dan Kota Makassar.

TVRI dan RRI juga dapat memberikan informasi untuk mendapatkan modal berupa kredit yang disalurkan pada sektor pertanian dari Kement-

rian Pertanian melalui Bank Pelaksana, seperti Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Usaha Perbibitan Sapi (KUPS).

Selain itu, seiring terjadinya lonjakan harga sapi akhir-akhir ini, TVRI dan RRI dapat memberikan pengetahuan kepada rakyat Indonesia dalam upaya meningkatkan populasi ternak sapi dengan cara pengembangan kawasan dan budidaya sapi potong, peningkatan kualitas bibit unggul, Penguatan Modal Usaha Kelompok (PUMK), pengembangan pakan, dan integrasi tanaman-ruminansia. (as) Foto:wy/parle.

Peneliti Setjen DPR Dikukuhkan Sebagai Profesor Riset

Setelah menempuh perjuangan sekian lama, peneliti dari Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Rabu (18/09) dikukuhkan sebagai profesor riset. Peneliti tersebut adalah Poltak Partogi Nainggolan yang sudah mengabdikan sebagai peneliti yang memberikan dukungan keahlian kepada DPR sejak tahun 1990.

Pengukuhan Prof. dilangsungkan dalam Sidang Majelis Profesor Riset dipimpin Ketuanya Prof. Dr. Lukman Hakim yang juga Kepala Lipi dihadiri sejumlah anggota DPR, Sekjen DPR Winatuningtyastiti, Sekjen MPR, sejumlah akademisi dari dalam dan luar negeri serta undangan lainnya di Gedung Nusantara V Senayan, Jakarta.

Dalam acara yang berlangsung khidmat dan lancar ini Poltak Partogi menyampaikan pidato pengukuhan berjudul Parlemen dan Hubungan Internasional: Diplomasi DPR-RI di Fora Internasional, dilanjutkan dengan pemasangan Widyamala serta penyerahan sertifikat.

Sekretaris Jenderal DPR RI Winatuningtyastiti saat memberikan sambutan pada acara ini mengatakan, pencapaian gelar sebagai profesor riset dari pusat pengkajian DPR bukanlah hal yang mudah sebab upaya tersebut dilakukan di tengah berbagai tugas yang diemban peneliti dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada Dewan.

Diplomasi Parlemen

Pada acara pengukuhan profesor riset ini, Poltak Partogi Nainggolan menegaskan bahwa diplomasi parlemen untuk



Suasana pengukuhan Profesor Riset Poltak Partogi Nainggolan.

kepentingan nasional harus diperjuangkan secara maksimal seperti lazimnya dilakukan para diplomat karir Kementerian Luar Negeri. “Sehingga dengan kehadiran parlemen di forum internasional terdapat fungsi representasi dan proteksi kepentingan negara,” tandas peneliti yang juga aktif dalam Perhimpunan Akademisi/Peneliti Asia Tenggara *Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg* dari tahun 2010 hingga saat ini.

Lebih lanjut Profesor Riset menjelaskan, berbagai bentuk diplomasi bilateral parlemen yang tidak terbatas pada kegiatan saling kunjung melainkan juga dilakukan di sela-sela berlangsungnya forum multilateral.

“Kinerja diplomasi parlemen telah banyak memberikan capaian kinerja yang membanggakan,” kata Profesor Riset yang sebelumnya menyelesaikan pendidikan S2 nya di Universitas Birmingham, Inggris tahun 1999 dan pendidikan S3nya di Universitas Freiburg, Jerman tahun 2011 tersebut seraya menjelaskan bahwa diplomasi parlemen yang dilakukan disela-sela berbagai forum multilateral misalnya

mampu membuat sikap anti-Indonesia yang menyudutkan kepentingan nasional tidak meluas pada saat isu mengenai Santa Cruz, Timor Timur bergulir.

Diungkapkan Partogi, diplomasi parlemen telah berulang kali membela kehormatan bangsa. Sebagaimana dilakukan Komisi I dan BKSAP yang dipimpin Abdul Ghafur yang berinisiatif mencari tahu nasib TKI yang dilaporkan disiksa. Selain itu, Komisi I DPR-RI dengan TNI AL yang menggunakan strategi *gun boat diplomacy* yang berhasil mencegah aksi kapal perang Malaysia mengganggu lebih lanjut upaya pekerja Indonesia membangun mercusuar di atas pulau karang yang diperebutkan yaitu Ambalat.

“Aksi diplomasi seorang diri Sutradara Gintings di Kamboja pada saat acara makan malam dimana Anggota Komisi 1 sekaligus anggota BKSAP DPR-RI menyanyikan lagu “Rasa Sayange” mendahului delegasi Malaysia sehingga mereka mengurungkan niat menyanyikan lagu yang selama ini telah

diklaim sebagai lagu negaranya, “ papar peneliti yang juga sempat mengenyam pendidikan *International Leadership* di *US State Departement/US Congress* ini menjelaskan.

Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti mengakui, berbagai capaian kinerja DPR-RI dalam diplomasi parlemen di forum internasional tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat. “Pada titik inilah kita melihat pentingnya riset berkenaan dengan Parlemen dan Hubungan Internasional.

Hal ini juga menunjukkan betapa kita memerlukan tenaga-tenaga peneliti yang mumpuni, memiliki integritas akademik yang kuat, dan sensitif terhadap berbagai kondisi yang ada dalam hubungan dunia internasional sehingga mampu memberikan masukan yang berharga kepada parlemen dalam upaya meningkatkan kinerja dalam bidang diplomasi parlemen,” imbuh Win yang juga telah meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia ini menandaskan. (mp) foto:ry/parle.

Dirut Bank Mutiara Janji Buat Skema Pembayaran

Direktur Utama Bank Mutiara berjanji akan membuat skema pembayaran dana nasabah eks Bank Century pada 2 Oktober 2013 mendatang. Ini merupakan desakan dari para anggota Tim Pengawas (Timwas) Bank Century DPR RI, Rabu (18/9).

Rapat Timwas Century dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dihadiri Sekjen Kementerian Keuangan, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Direksi Bank Mutiara, dan Forum Nasabah Bank Century. Sudah sekian lama para nasabah dan juga para anggota Timwas menginginkan langkah konkrit ini.

Desakan bertubi-tubi dilayangkan para anggota Timwas secara bergantian kepada Dirut Bank Mutiara untuk segera menyusun skema pembayaran dana nasabah yang terkatung-katung selama hampir 5 tahun. Kecuali F-PD, anggota lainnya dari F-PG, F-PKS, F-PDI Perjuangan, dan F-PAN mendesak Direksi Bank Mutiara untuk menjalankan putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap. Isi putusan tersebut agar dana nasabah Bank Century segera dibayarkan.

Sebelumnya, Dirut Bank Mutiara sempat berkilah bahwa dana nasabah belum bisa dibayarkan, karena pihaknya telah mengajukan PK atas putusan kasasi MA itu. Jadi, katanya, masih harus menunggu putusan PK dahulu. Namun, Anggota Timwas Dolfi OFP (F-PDI Perjuangan), segera menanggapi dengan argumen hukum Pasal 66 (2) UU No.3/2009 tentang MA bahwa upaya hukum PK tidak menghalangi eksekusi putusan kasasi MA.

Atas dasar hukum itu, Direksi Bank Mutiara diminta menaati hukum. Tak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pembayaran dana nasabah eks Bank Century. Ahsanul



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso berjabat tangan dengan jajaran Kementerian Keuangan dan Direksi Bank Mutiara.

Qosasih (F-PD) sempat mengusulkan agar pembayaran dana nasabah ditalangi terlebih dahulu dari APBN. Dengan begitu pembayarannya bisa lebih cepat. Namun, Bambang Susetyo (F-PG) berbeda pandangan.

Menurut Bambang, APBN bisa jebol bila digunakan untuk menalangi dana nasabah Century. Itu sama saja dengan menjebol keuangan negara untuk kedua kalinya setelah dijebol oleh Bank Century. Sekjen Kemenkeu juga menolak menggunakan dana APBN. Katanya, APBN bukan milik Kemenkeu. Kasus Bank Century adalah peristiwa hukum antara *business to business*. Tentu tidak bisa diserahkan ke negara untuk menalangi. Apalagi, saat ini sedang ada penghematan anggaran. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

Program Kube Gagal Karena Tidak Ada Pengawasan

DPR menilai kegagalan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) disebabkan tidak adanya pengawasan. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI, Kasma Bouty dalam RDP dengan Sekjen, Dirjen Dayasos dan Gulkin serta Dirjen Linjamsos Kementerian Sosial RI, Rabu (18/9).

Ditambahkannya pengawasan yang dimaksud termasuk diantaranya pendampingan bagi penerima program tersebut. Mulai dari produk yang memiliki nilai jual, *packing* atau kemasan serta pemasaran produk tersebut.

“Apakah di NTT produk tersebut bisa dipasarkan atau tidak. Selama ini saya lihat produknya sudah bagus, kemasannya juga tapi dalam pemasaran sangat kurang. Ini juga percuma, karena sebuah produk akan dikenal dan laku di pasaran jika ada strategi pemasaran yang baik,” ungkap Kasma.

Tidak berbeda jauh dengan Kasma Bouty, anggota Komisi VIII lainnya,



Anggota Komisi VIII DPR Mahrus Munir.

Mahrus Munir mengakui bahwa sebenarnya Kube merupakan program unggulan kementerian sosial. Namun apakah Kemensos sudah mensurvey apakah program tersebut menjadi program terbaik dan tepat untuk masyarakat dari tersebut (NTT-red) atau ada program lain yang lebih tepat

dibanding Kube.

“Saya tidak tau apakah sebelum menjalankan program Kube dari Kemensos sudah lebih dahulu melakukan survey, apakah program tersebut benar-benar tepat dan cocok diselenggarakan di daerah tersebut. Karena untuk menjalankan program Kube juga membutuhkan pemberdayaan masyarakat. Jika memang ada program yang lebih baik, alangkah lebih baiknya jika program Kube diganti dengan program yang lebih baik,” papar Mahrus Munir.

Seperti diketahui Kube atau kelompok usaha bersama merupakan sebuah upaya pemberdayaan masyarakat melalui wadah kelompok yang beranggotakan sekitar sepuluh KK. Khusus untuk program Kube yang menjadi salah satu bagian dalam percepatan pembangunan masyarakat berpendapatan rendah (MBR) di NTT, ini Kementerian sosial mengalokasikan anggaran dana sebesar 20 miliar. (ayu)/foto:wahyu/parle/iw.

Duta Besar Cina Tinjau Ruang Rapat Paripurna DPR

Duta Besar China Liu Jianchao dan rombongan meninjau ruang rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, dalam rangka persiapan kunjungan Presiden China pada tanggal 3 Oktober 2013 mendatang.

Sesuai jadwal, Presiden China akan mengunjungi Gedung Parlemen DPR RI, serta menyampaikan pidato dihadapan anggota DPR RI. “Ini merupakan sejarah pertama kalinya Pimpinan negara sahabat melakukan pidato kenegaraan di hadapan anggota dewan kita,” ujar Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti sesuai mendampingi Dubes China di Gedung DPR RI, Rabu (18/9).

Win mengatakan, pihak kedutaan besar China sangat takjub terhadap



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti foto bersama Dubes China Liu Jianchao dan rombongan.

persiapan DPR dalam menyambut tamu kenegaraan. Kunjungan Presiden China bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara baik di level eksekutif maupun legislatif serta membuka peluang kerjasama yang menguntungkan antar kedua negara.

Menurut sumber Kesekjenan DPR, Presiden China direncanakan akan membawa Wakil Perdana Menteri China dan 10 Menteri di kabinetnya saat melawat ke Indonesia. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi IV Susun Amandemen UU Tentang Perkebunan

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mendapat perhatian dari masyarakat, pekebun, dan perusahaan perkebunan. Salah satunya terdapat pasal-pasal yang diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

“Berdasarkan Putusan MK rumusan norma yang terkandung pada Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” jelas Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, saat memimpin RDP dengan Dirjen Perkebunan, Rabu (18/7) di Gedung DPR RI.

Menurut politisi dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron, perubahan ini merupakan jawaban dari aspirasi pemenuhan kebutuhan hukum di dalam masyarakat akan efektifitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dalam menjawab perkembangan dan tantangan di bidang perkebunan.

Adapun isu-isu yang akan menjadi materi perubahan diantaranya adalah mengenai paradigma penanganan konflik sengketa lahan perkebunan; kepemilikan modal asing; kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana perkebunan; perizinan; hak atas tanah perkebunan; sistem informasi; hak dan kewajiban; sanksi administratif; dan sanksi bagi pejabat.

Komisi IV DPR RI Bidang Pertanian mengharapkan Perubahan atas UU tentang Perkebunan, dapat menjadi aturan di bidang perkebunan yang semakin komprehensif dengan mengatur secara berimbang dan proporsional berbagai pihak di dalam perkebunan, yaitu pemerintah, pelaku

usaha, masyarakat, dan pekebun.

Selain itu, perubahan ini juga diharapkan mampu menjawab berbagai perkembangan dan kebutuhan masyarakat agar subsektor perkebunan dapat berkembang dengan maksimal, dengan menambah dan memperbaiki beberapa ketentuan dalam UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.



Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron.

Patut diketahui, UUNo. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan merupakan landasan hukum bagi pengusaha Perkebunan. Perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, serta optimalisasi Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.

“Pengusahaan perkebunan dilaksanakan harus sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Herman.

Di sisi lain, Indonesia juga menjadi negara produsen karet terbesar kedua di dunia dengan produksi mencapai 2,64 juta ton, dan 85 persen pengusahaannya melibatkan perkebunan rakyat. “Tenaga kerja yang terlibat di dalamnya mencapai 2 juta kepala keluarga,” imbuh Herman Khaeron. (as).foto:ry/parle

Komisi I Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Dubes

Komisi I DPR RI melakukan *fit and proper test* terhadap 22 calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) RI, selama dua hari pada tanggal 17 - 18 September 2013, bertempat di Ruang Komisi I DPR RI, Jakarta. Setelah sebelumnya, pihak Pemerintah menyerahkan daftar nama-nama calon Duta

Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI (Dubes LBBP RI).

Penilaian terhadap calon dubes RI itu di antaranya menyangkut visi dan misi, kemampuan bahasa, serta cara dan kemampuan berdiplomasi kedua-puluh satu calon Dubes tersebut saat

kelak ditempatkan di negara tujuan. Dari hasil *fit and proper test* ini kemudian Komisi I DPR RI akan memberikan rekomendasi kelayakan calon Duta Besar tersebut kepada Pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan, menyebutkan “Dalam



Anggota Komisi I DPR Meutya Viada Hafid.

hal pengangkatan duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.”

Diharapkan dengan penempatan para calon-calon Duta Besar LBBP RI ini akan lebih mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Negara sahabat. Hasil keputusan Komisi I DPR RI tentang *fit and proper test* dalam rangka pemberian pertimbangan terhadap Calon Dubes LBBP RI untuk negara sahabat/ organisasi internasional kemudian

disampaikan kepada pimpinan DPR RI untuk diteruskan kepada Presiden RI

Setiap calon menyampaikan paparan visi-misinya. Kemudian masing-masing fraksi mengajukan pertanyaan. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Meutya Viada Hafid menjelaskan, dalam acara pemberian pertimbangan Calon Duta Besar LBBP RI untuk negara-negara sahabat dan organisasi internasional, yang dilakukan di Ruang Komisi I pada Selasa (17/9) ini diikuti 10 calon dubes dan Rabu (18/9) diikuti 12 calon dubes.

“Adapun setiap sesi akan langsung diikuti 3 calon dubes,” ujar Meutya Viada Hafid di sela-sela acara pemberian pertimbangan Komisi I terhadap Calon Dubes LBBP RI untuk negara-negara sahabat dan organisasi Internasional, Selasa (17/9) petang yang berlangsung secara tertutup.

Aturan utamanya, kata Meutya, setiap calon menyampaikan paparan visi-misinya selama empat menit. Kemudian masing-masing fraksi mengajukan pertanyaan, paling lama lima

menit. “Lalu pihak calon dubes memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan DPR, paling lama 15 menit masing-masing dubes,” jelasnya.

Pada sesi I ini tiga calon dubes yang hadir adalah Komjen (Purn) Ito Sumardi (Uni Myanmar), Linggawaty Hakim (Swiss), dan Raudin Anwar (Libya).

Selama ini, mantan anggota dari Kepolisian, selalu menempati pos sebagai Duta Besar RI di Malaysia. Mengomentari hal tersebut, Meutya mengatakan tidak masalah jika mantan anggota kepolisian menempati pos di luar negara Malaysia, seperti di Myanmar.

“Kondisi Myanmar yang masih ada pergolakan dan gangguan keamanan, memerlukan duta besar yang memiliki latar belakang dari kepolisian. Jadi menurut saya tidak masalah. Tapi proses ini sendiri belum selesai ya. Nanti di Komisi I masih akan bahas hasilnya seperti apa. Sehingga belum tentu juga yang bersangkutan tetap menduduki pos sebagai Dubes RI di Myanmar,” tegasnya. (as)/foto:odjie/parle/iw.

Surya Chandra : Dari Segi Profesi Perawat dan Bidan Berbeda

Terkait usul pemerintah yang ingin menggabungkan antara Keperawatan dan Kebidanan dalam satu Undang-Undang, anggota Komisi IX DPR RI, Surya Chandra Surapaty berpendapat judul RUU tetap yaitu RUU tentang Keperawatan sesuai dengan RUU Usul Inisiatif DPR RI.

“Kalaupun nanti tahun depan dibuat RUU Kebidanan, kita akan bahas Kebidanan,” kata Surya di sela-sela Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Kesehatan dengan agenda pembahasan RUU tentang Keperawatan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/9)

Surya menjelaskan, bahwa berdasarkan perkembangan terakhir pendidikan Keperawatan dan Kebidanan itu sudah dipisah. Begitu pula dengan pelaksanaan di lapangan juga terpisah. Menurutnya, nanti akan sulit kalau UU



Anggota Komisi IX DPR Surya Chandra Surapaty.

ini digabung-gabungkan.

“Karena tujuan UU itu adalah untuk

melindungi dan mendayagunakan profesi. Ada 14 profesi di bidang kesehatan, semuanya meminta per-

lindungan dan minta pendayagunaan yang dipayungi UU,” imbuh politisi PDI Perjuangan.

UU di bidang kesehatan, seperti UU Kesehatan, UU Kedokteran, UU Pendidikan Kedokteran, UU Praktek Kedokteran. “Nanti ada profesi Farmasi, Tenaga Sanitasi, Profesi Kebidanan, dan lain-lain,” ujarnya.

Surya menyatakan bahwa RUU tentang Keperawatan nantinya akan melindungi segenap tindakan atau apa yang dilakukan perawat didalam mem-

bantu derajat kesehatan masyarakat. UU Keperawatan ini juga akan mendorong untuk lebih mengembangkan profesinya, sehingga betul-betul seorang perawat itu tidak ceroboh dalam menjalankan profesinya.

Menurut Surya, mengapa pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan mengusulkan penggabungan antara Keperawatan dan Kebidanan, hal ini agar tetap peranan pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi dua bidang tenaga kesehatan itu.

“Jika untuk registrasinya itu wewenang pemerintah, tapi kalau untuk melindungi profesinya dan mendayagunakan profesinya itu adalah peranan dari Konsil Keperawatan yang bukan lembaga pemerintah,” papar Surya.

“Jika seorang perawat dikirim ke luar negeri, keabsahan profesinya itu disahkan Konsil Keperawatan bukan oleh Kementerian Kesehatan,” tambahnya mengakhiri. (sc)/foto:iwan armanias/parle.

BKSAP DPR Terima Kunjungan Menlu dan Dubes Serbia

DPR memandang ada beberapa sektor kerjasama yang sangat potensial untuk dikembangkan antara Indonesia dan Serbia. Salah satunya di bidang produk pertahanan.

Hal tersebut terungkap saat BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) DPR RI menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Serbia, Goran Aleksic, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (17/9).

“Yang dimaksud kerjasama disini, tidak hanya sebatas latihan bersama militer Indonesia, melainkan *sharing technology* atau tukar menukar teknologi, serta informasi dalam bidang persenjataan,” jelas Ketua Group Kerjasama Bilateral (GKSB), Milton Pakpahan.

Ditambahkannya, selama ini Serbia memiliki teknologi yang cukup canggih. Demikian pula halnya dengan Indonesia. Sebagai Negara terbesar di Asia tenggara, Indonesia dipandang Serbia cukup maju dalam bidang persenjataan perangnya. Sehingga dalam kerjasama ini, tidak hanya Indonesia saja yang bisa belajar dari Serbia, namun juga sebaliknya.

Wakil Ketua BKSAP, Andi Anzhar Cakra Wijaya menambahkan selain dalam bidang teknologi dan persenjataan, banyak hal yang bisa dilakukan kedua negara misalnya dalam bidang



Wakil Ketua BKSAP Andi Anzhar Cakra Wijaya bertukar cinderamata dengan Dubes Serbia.

ekonomi, budaya dan sosial. Seperti diketahui Serbia sangat unggul dalam pengembangan bunga matahari (*sunflower*) yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi.

Dalam bidang sosial budaya, DPR berharap dapat diselenggarakannya kegiatan bersama seni budaya tahun 2014 mendatang dalam kerangka memperingati enam puluh tahun hubungan diplomatik Indonesia-Serbia.

“Kami juga mendorong Serbia untuk bergabung dalam Konferensi Negara-negara Islam (OKI), mengingat Islam menjadi agama terbesar kedua di Ser-

bia. Hal tersebut Terlihat juga adanya keinginan dari Serbia sebagai *observer* dalam OKI,” jelas Andi.

Sementara itu Wakil Menteri Luar Negeri Serbia, Goran Aleksic saat ditanya Parle berharap agar kunjungannya kali ini ke DPR dapat saling mempererat hubungan kerjasama bilateral antara Serbia dan Indonesia yang telah berlangsung lebih dari lima dekade. Bagi Goran, Indonesia merupakan negara yang indah, ramah dan damai meski dengan keanekaragaman etnis, budaya dan agama. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle.



Foto bersama se usai Pembukaan Sidang AIPA ke-34 (kiri) dan Acara Courtesy Call Presiden AIPA sekaligus pertukaran cinderamata (kanan) di gedung Indera Samudera The Empire Hotel, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, (17-22/9). Foto: Eka Hindra/Parle.



Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan Dubes China Liu Jian Chao meninjau ruang rapat paripurna DPR, Rabu (18/9). Foto: Iwan Armanias/Parle.



Tim Panja Pengembangan Perpustakaan Komisi X DPR foto bersama dengan Guru-guru SMA Negeri 2 Palu Sulteng, Kamis (12/9). Foto: Iwan Armanias/Parle.